

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

World Investment Report 2004 menempatkan Indonesia pada urutan ke-139 dari 144 negara yang pada saat ini menjadi tujuan investasi di dunia. Indonesia hanya lebih baik daripada beberapa negara di Amerika Tengah serta Suriname, Belgia, Luksemburg, dan Brunei Darussalam berada di barisan atas negara yang paling diminati para penanam modal. Sementara pada saat yang sama, Indonesia juga tidak termasuk dalam jajaran negara-negara berkembang penanam modal utama yang mampu melampaui tingkat investasi yang dilakukan negara-negara maju (World Bank, 2005:442).

Sejak pertengahan 1997, Indonesia dan sebagian beberapa negara Asia Tenggara dan Timur mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh beberapa faktor baik yang bersifat eksternal maupun internal. Penarikan dana secara tiba-tiba dalam jumlah yang besar oleh para investor asing yang didorong oleh ketidakpercayaan prospek perekonomian regional dengan segera melemahkan mata uang rupiah secara drastis. Gelombang *capital outflow* tersebut kemudian diikuti oleh aksi beli dollar penduduk domestik yang membuat nilai rupiah semakin terpuruk. Melemahnya nilai rupiah melalui berbagai transmisi menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan kepada sektor-sektor perekonomian dengan tingkat keseriusan yang berbeda-beda. Sementara itu fluktuasi nilai tukar tampaknya semakin sulit diprediksi, sehingga untuk menghentikan laju spekulasi dilakukan pengetatan moneter dengan konsekuensi

suku bunga tinggi. Meningkatnya suku bunga umum tersebut secara paralel kemudian mendorong keatas bunga pinjaman atau biaya modal bagi perusahaan-perusahaan sektor riil. Kenaikan biaya modal tersebut dengan sendirinya mengganggu perencanaan investasi maupun produksi jangka panjang yang pada akhirnya berpengaruh pada menurunnya penawaran agregat (Noor Yudanto dan M. Setyawan Santoso: 1998).

Seperti yang kita ketahui sebelum meletusnya krisis moneter, Indonesia berhasil mempertahankan *surplus balance of payments*-nya, rata-rata per tahun sebesar 2,574 milyar dollar AS selama periode 1990-1996. Pada tahun pertama krisis, Indonesia harus menghadapi *balance of payments deficit* sebesar 2,459 dollar AS. *Deficit* yang besar pada *balance of payments* ini disebabkan oleh *outflows* yang sangat besar dari modal swasta di Indonesia. Selama 1990an, Indonesia menikmati *private capital inflows* yang besar dalam bentuk *private foreign direct investments* (FDI)/ PMA . Selama periode 1990-1996, *private* FDI mengalir ke perekonomian Indonesia pada nilai rata-rata 2,715 milyar dollar AS per tahun. Sedangkan FDI/ PMA yang ditarik keluar Indonesia adalah sebesar 356 juta dollar pada tahun 1998 dan 2,74 milyar dollar AS pada 1999. (Awan Wibowo Laksono Poesoro, 2005).

Dari tahun 1985 sampai dengan akhir tahun 1997, investasi asing langsung Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Namun, Indonesia terus memperlihatkan penurunan investasi (*disinvestment*) sejak krisis keuangan regional tahun 1998. Sekitar 1,172 milyar dollar AS investasi keluar

dari Indonesia dalam enam bulan pertama tahun 2002, dibanding 3,3 milyar dollar AS sepanjang tahun 2001. (Kompas, 20 Febuari 2003).

(Tabel 1.1)
Perkembangan Investasi Asing Langsung (FDI) di Indonesia
Periode 1985-2005

Tahun	Jumlah proyek	Nilai Investasi Asing (FDI) (dalam US \$ Miliar)	Perubahan (dalam US \$ Miliar)	Pertumbuhan (%)
1985	46.00	913.10		
1986	93.00	1,056.80	143.70	15.74
1987	141.00	1,918.10	861.30	81.50
1988	147.00	4,447.70	2,529.60	131.88
1989	308.00	4,898.30	450.60	10.13
1990	444.00	9,639.60	4,741.30	96.79
1991	390.00	9,030.20	-609.40	-6.32
1992	304.00	10,466.10	1,435.90	15.90
1993	330.00	8,153.80	-2,312.30	-22.09
1994	444.00	27,046.40	18,892.60	231.70
1995	782.00	39,891.60	12,845.20	47.49
1996	947.00	29,941.00	-9,950.60	-24.94
1997	783.00	33,816.10	3,875.10	12.94
1998	1,034.00	13,585.50	-20,230.60	-59.83
1999	1,174.00	10,892.20	-2,693.30	-19.82
2000	1,524.00	15,426.20	4,534.00	41.63
2001	1,333.00	15,055.90	-370.30	-2.40
2002	1,135.00	9,744.10	-5,311.80	-35.28
2003	1,060.00	13,596.40	3,852.30	39.53
2004	1,190.00	10,279.80	-3,316.60	-24.39
2005	1,648.00	11,025.30	745.50	7.25
Jumlah	15,257.00	280,824.20	10,112.20	537.41
Rata-rata	726.52	13,372.58	505.61	26.87

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), BPS (diolah)

Berdasarkan data yang diperoleh dari *The Japan External Trade Organization* (JETRO) penurunan FDI/ PMA di Indonesia diduga karena adanya faktor-faktor penting yang menghambat masuknya investasi asing langsung (FDI)/ PMA ke Indonesia diantaranya adalah faktor *uncertainty* (ketidakjelasan) yang diciptakan oleh pemerintah sebagai penjamin keamanan dan penentu keuntungan para investor asing di Indonesia. Dari hasil survey menunjukkan bahwa negara

Indonesia dibandingkan dengan Thailand yang mendapatkan jawaban responden sebesar 10 persen untuk ketidakjelasan kebijakan pemerintah daerah, 46 persen untuk ketidakjelasan sistem perpajakan, dan 42 persen untuk tingginya upah buruh dan rendahnya produktivitas tenaga kerja, maka jawaban yang diterima Indonesia untuk kategori-kategori yang sama yaitu sebesar 68 persen, 72 persen, dan 86 persen, hal tersebut menggambarkan betapa lemahnya daya saing iklim berusaha yang dimiliki Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga pesaing kita itu (Lihat Tabel 1.2).

(Tabel 1.2)
Faktor-Faktor Penting Penghambat Investasi
 (% Jawaban Responden)

Negara	Ketidakjelasan kebijakan pemerintah daerah	Ketidakjelasan sistem perpajakan	Ketidakjelasan prosedur perdagangan dan beacukai	Tingginya upah buruh dan rendahnya produktivitas tenaga kerja
Singapura	6	13	21	54
Thailand	10	46	63	42
India	15	56	59	56
Malaysia	17	11	34	52
Filipina	48	21	37	37
Vietnam	61	40	57	30
Indonesia	68	72	68	86

Sumber : JETRO (dikutif dari penelitian Awan Wibowo Laksomo Poesoro, 2005)

Hal serupa juga diungkapkan oleh WEF, berdasarkan survey yang dilakukan oleh *World Economic Forum* (WEF) mengenai faktor-faktor penghambat investasi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan WEF, bahwa yang menjadi penghambat investasi di Indonesia adalah:

1. Birokrasi pemerintah yang tidak efisien (21%)
2. Infrastruktur yang tidak memadai (19%),
3. Peraturan perpajakan (15%),
4. Korupsi (11%),
5. Kualitas sumber daya manusia (9%),

6. Instabilitas kebijakan (7%)
7. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan(4%)

Sumber: Survey World Economic Forum 2005, dikutip Kompas, 20 Maret 2006

Demikian pula dengan yang diungkapkan oleh **Mudrajad Kuncoro** (2005) bahwa Selain faktor yang diungkapkan diatas, Faktor penyebab utama belum banyak Bergeraknya investasi sektor riil terutama karena iklim investasi Indonesia dinilai masih jauh lebih buruk dibanding Cina, Thailand, Vietnam dan negara-megara ASEAN lainnya. Faktor penyebabnya adalah masalah perburuhan (meningkatnya biaya buruh dan demonstrasi buruh), masalah pabean, tidak adanya insentif fiskal, dan berbagai kebijakan daerah/pusat yang tidak pro-bisnis.

Berdasarkan hasil survey JETRO dan WEF terlihat bahwa faktor penghambat masuknya FDI/ PMA ke Indonesia diakibatkan oleh ketidakjelasan peraturan pemerintah dalam hal perizinan sehingga birokrasi pemerintah tidak efisien yang pada akhirnya para investor harus menanggung biaya yang lebih tinggi untuk mengurus perizinan dan waktu untuk memulai usaha baru pun menjadi lama. (lihat tabel 1.3)

(Tabel 1.3)
Jangka Waktu Dalam Memulai Sebuah Kegiatan Baru

Negara	Jangka Waktu (Hari)	Biaya (Dolar AS)
Vietnam	56	136
Cina	41	158
Thailand	33	160
Filipina	50	202
India	89	265
Malaysia	30	966
Indonesia	151	1.163

Sumber : Laporan bank Dunia(dikutif dari penelitian Awan Wibowo Laksono Poesor, 2005)

Berdasarkan pengkajian Bank Dunia tahun lalu terhadap peraturan perundangan yang ada, dibutuhkan sekitar 11 prosedur pokok untuk memulai usaha di Indonesia. Proses itu memakan waktu 168 hari atau hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan rata-rata negara Asia Timur lainnya yaitu sekitar 66 hari. Prosedur yang panjang dan berbelit-belit itu mengakibatkan munculnya ekonomi biaya tinggi yang sangat tidak memihak pada investor (**Top Line Solusi Business Club** Edisi 45 : Capres & Tim Sukses Ekonomi).

Selain faktor perizinan yang berbelit-belit sehingga menimbulkan biaya ekonomi tinggi, faktor selanjutnya yang menjadi penghambat investasi ke Indonesia adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan Dari hasil penelitian IFC (*International Finance Corporation*) disebutkan bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia paling rendah dibanding dengan negara Asia Tenggara lainnya. Jika dihitung per hari (8 jam), tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia rata-rata dalam 1 hari atau 8 jam, sama dengan 11 menit tenaga kerja Singapura (**Top Line Solusi Business Club** Edisi 45 : Capres & Tim Sukses Ekonomi).

Berdasarkan data yang ada, Produktivitas di Indonesia amat memprihatinkan bahkan bila dilihat kontribusinya bagi GDP, Produktifitas justru menjadi faktor pengurang. Hal ini yang kemudian perekonomian Indonesia menjadi semakin terpuruk secara makro setelah krisis,. Sebelum tahun 1998, GDP ternyata lebih didominasi oleh *capital* dan *labour* yang justru tidak produktif sehingga ketika krisis ekonomi datang tidak ada ketahanan. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan yang tutup, investor yang kemudian mengalihkan investasinya

ke negara lain karena tidak kompetitif dan semakin banyak tenaga kerja yang kemudian menganggur dan pertumbuhan ekonomi negara semakin berjalan lambat (**Baskoro Agung Nugroho**, 2005).

Selain rendahnya produktivitas tenaga kerja, faktor lain yang menjadi penghambat investasi di Indonesia adalah berkaitan dengan stabilitas makro yang diciptakan oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal. Menurut **Laporan Bank Indonesia** tahun 2006, terjadinya penurunan tingkat investasi adalah sebagai dampak dari pemberlakuan kebijakan fiskal. Pemerintah dalam melakukan kebijakan fiskal melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif. Kebijakan tersebut sebagai instrumen untuk mengatur stabilitas perekonomian Indonesia sangat mempengaruhi keberadaan investasi asing masuk ke Indonesia khususnya penurunan tingkat *foreign direct investment* (FDI)/ PMA di Indonesia. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil survey *World Bank* tahun 2004 bahwa Indonesia memiliki kendala ketidakpastian kebijakan pemerintah sebesar 48.2% dari 713 sampel yang diukurinya (*World Bank*: 2005, 442).

Menurut **Endin A.J. Soefihara** (2002: 46) akibat menurunnya pendapatan negara dan membengkaknya pengeluaran negara yang mengakibatkan terjadinya defisit anggaran di negara Indonesia sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat luar negeri terhadap pemerintah Indonesia yang tidak bisa mengelola kebijakan fiskal.

Masalah yang tidak kalah pentingnya bagi iklim investasi di Indonesia, masih berkaitan dengan stabilitas ekonomi yaitu inflasi. Seperti yang kita ketahui bahwa inflasi yang tinggi merupakan penyakit ekonomi. Berbicara soal inflasi,

berarti kita mempersoalkan kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat, dan secara langsung akan memengaruhi *income* sektor riil masyarakat. Untuk itu, inflasi sedapat mungkin harus dihindarkan dari proses kegiatan ekonomi yang tengah berjalan. Kehadiran inflasi bisa merusak tatanan perekonomian yang tengah dibangun (Thomas Bustomi, 2006).

Inflasi rendah dan stabil dalam jangka panjang, justru akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable growth*). Penyebabnya, karena tingkat inflasi berkorelasi positif dengan fluktuasinya. Manakala inflasi tinggi, fluktuasinya juga meningkat, sehingga masyarakat merasa tidak pasti dengan laju inflasi yang akan terjadi di masa mendatang. Akibatnya, suku bunga jangka panjang akan meningkat karena tingginya premi risiko akibat inflasi. Perencanaan usaha menjadi lebih sulit, dan minat investasi pun menurun. Ketidakpastian inflasi ini cenderung membuat investor lebih memilih investasi asset keuangan jangka pendek ketimbang investasi riil jangka panjang. Itulah sebabnya, otoritas moneter seringkali berargumentasi bahwa kebijakan yang anti inflasi sebenarnya adalah justru kebijakan yang pro pertumbuhan (BI, 2004).

Dengan adanya faktor-faktor penghambat masuknya *Foreign Direct investment* (FDI)/ PMA di Indonesia, tentu saja akan berdampak terhadap tingkat perekonomian di Indonesia. Karena *Foreign Direct Investment* (FDI)/ PMA ini sangat penting keberadaannya di Indonesia, sebagai motor penggerak roda perekonomian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga diperlukan adanya sebuah penelitian mengenai keberadaan *Foreign Direct Investment* (FDI)/ PMA di Indonesia supaya bisa didapat sebuah alternatif

pemecahan masalahnya. Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan diatas maka akan melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI ASING LANGSUNG/ FOREIGN DIRECT INVESMENT (FDI) DI INDONESIA PERIODE 1985-2005**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka lingkup permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Kebijakan Regulasi Perizinan terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI)/ PMA di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh produktivitas tenaga kerja terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI)/PMA di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI)/ PMA di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI)/ PMA di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kebijakan Regulasi Perizinan terhadap *Foreign Direct Investment (FDI)*/ PMA di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh produktivitas tenaga kerja terhadap *Foreign Direct Investment (FDI)*/ PMA di Indonesia
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan fiskal terhadap *Foreign Direct Investment (FDI)*/ PMA di Indonesia
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi terhadap *Foreign Direct Investment (FDI)*/ PMA di Indonesia

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai tambahan informasi dan wawasan bagi para mahasiswa dan masyarakat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan regulasi perizinan, produktivitas tenaga kerja, kebijakan fiskal, dan inflasi terhadap perkembangan *Foreign Direct Investment (FDI)*/ PMA di Indonesia
2. untuk memberikan sumbangan terhadap pemikiran dan perkembangan ilmu ekonomi khususnya kajian makro ekonomi mengenai *Foreign Direct Investment (FDI)*/ PMA di Indonesia
3. Sebagai penambah khasanah dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi

1.4 Kerangka Pemikiran

John Maynard Keynes (1936) mendasarkan teori tentang permintaan investasi atas konsep efisiensi marginal kapital (*marginal efficiency of capital*) atau MEC. Keynes berpendapat bahwa rangsangan untuk melakukan investasi tergantung pada hasil dari “efisiensi modal marginal” dan tingkat bunga. MEC dapat didefinisikan sebagai tingkat perolehan bersih (keuntungan tinggi) yang diharapkan (*expected net rate of return*) atas pengeluaran kapital tambahan, yakni tingkat diskonto (*discount rate*) yang menyamakan aliran perolehan yang diharapkan dimasa yang akan datang dengan biaya sekarang dari kapital tambahan (Muana Nanga, 2001).

Teori akselerator yang dikembangkan oleh **Jorgenson** (Muana Nanga, 2001:126-129), merupakan teori investasi yang itu didasarkan pada hubungan antara investasi dan produksi, atau dengan kata lain, investasi berkaitan dengan tingkat perubahan pendapatan nasional. Jika pendapatan naik, maka perlu investasi untuk menambah kapasitas guna memproduksi barang konsumsi. Jika pendapatan nasional mengalami penurunan maka tidak diperlukan penggantian peralatan pabrik yang sudah lama, apalagi melakukan investasi barang modal yang baru.

Teori akselerator ini memusatkan perhatiannya pada hubungan antara permintaan barang modal (*capital goods*) dan permintaan akan produk akhir (*final product*). Dalam bentuk yang paling sederhana, teori ini dimulai dengan mengasumsikan adanya *Capital-Output Ratio* (COR) yang tertentu, yang ditentukan oleh kondisi teknis produksi. COR ini menggambarkan tingkat

efisiensi dari investasi. Selanjutnya, hubungan antara kapital dan output (COR)

tersebut secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\frac{K}{Y} = k \dots \dots \dots (1.1)$$

Dimana:

K = jumlah kapital yang digunakan.

Y = tingkat output agregat.

K = rasio kapital-output yang tetap (*fixed capital output ratio*).

Sebab dengan suatu rasio kapital-output yang tetap, maka persamaan (1.1) akan tetap untuk seluruh kurun waktu. Karena investasi bersih (*net investment*) pada periode waktu t, It secara definisi adalah sama dengan perubahan di dalam stok kapital sepanjang kurun waktu t, maka secara matematis dapat dinyatakan sebagai

berikut:

$$\begin{aligned} I &= K_t - K_{t-1} \\ &= k(Y_t - Y_{t-1}) \\ &= k \times \Delta Y_t \dots \dots \dots (1.2) \end{aligned}$$

Persamaan (1.2) ini menunjukkan bahwa investasi netto (I_t) adalah sama dengan koefisien akselerator (k) dikali dengan perubahan dalam output agregat selama kurun waktu t (I_t). Oleh karena k diasumsikan konstan, maka investasi netto dengan sendirinya menjadi fungsi dari perubahan di dalam output agregat. Kalau output agregat meningkat, maka investasi netto akan positif. Jika output agregat meningkat dengan jumlah yang semakin besar, maka investasi netto akan meningkat dengan jumlah yang lebih besar lagi.

Teori Investasi Neoklasik melihat kaitan tingkat investasi dengan produktivitas marginal, tingkat bunga dan perpajakan yang mempengaruhi

produsen (Perusahaan). Teori ini mengasumsikan bahwa perusahaan akan melakukan investasi jika proyek investasi memiliki ekspektasi akan memperoleh keuntungan, dimana tambahan modal tidak akan dilakukan kecuali jika *marginal product of capital* (MPK) yang diharapkan paling tidak sama dengan *real user cost of capital*. MPK adalah tambahan output yang dapat dihasilkan perusahaan melalui satu unit tambahan modal. Sedangkan *user cost of capital* (biaya penggunaan modal) adalah biaya atas penggunaan satu satuan modal selama periode tertentu.

Dalam teori ini, besarnya stok kapital yang optimal dapat ditentukan ketika nilai produk marginal kapital sama dengan besarnya biaya modal, kondisi ini memungkinkan penambahan penggunaan input kapital pada saat produk marginal modal lebih besar dari biaya modal. Dalam teori ini digunakan asumsi:

1. Perusahaan berada dalam pasar persaingan sempurna, dimana perusahaan dapat membeli dan menjual pada harga yang diinginkan.
2. Adanya pengaruh teknologi yang menentukan untuk menambah input modal.
3. Investasi ditentukan oleh berbagai harga yaitu tingkat bunga, biaya kapital (depresiasi, ekspektasi inflasi, pajak).

Berdasar teori ini, perusahaan membuat keputusan tenaga kerja, investasi dan produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Selain itu teknologi berperan penting dalam menentukan output yang akan diproduksi. Dalam investasi Neoklasik yang lebih diperhatikan adalah suku bunga riil, dimana suku bunga telah disesuaikan dengan inflasi. Dalam asumsi maksimasi laba, penggunaan mesin dan peralatan yang mengalami depresiasi sebagai sebuah "*opportunity cost*" dari



shareholder, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan bahwa investasi barang modal yang dilakukan memberi kontribusi terhadap keuntungan perusahaan, dimana keuntungan harus lebih besar dari *cost of capital* (Muana Nanga, 2001:130-131).

Teori Dana Internal (*internal funds theory of investment*) menyatakan bahwa stok kapital yang diinginkan dan juga investasi, bergantung pada tingkat keuntungan. **Jan Tinbergen**, menyatakan bahwa keuntungan yang terjadi (*realized profits*) secara akurat merefleksikan keuntungan yang diharapkan (*expected profit*). Karena investasi bergantung pada keuntungan yang diharapkan, maka investasi adalah berhubungan secara positif dengan *realized profits*. Teori Dana Internal mengatakan stok kapital yang diinginkan dan investasi ditentukan oleh keuntungan. Kebijakan yang ditekankan yaitu kebijakan fiskal yang ekspansif dimana penurunan dalam pajak pendapatan perusahaan akan menyebabkan kenaikan yang signifikan didalam stok kapital yang diinginkan dan investasi. (Muana Nanga, 2001: 129).

Berdasarkan teori-teori diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa keputusan seseorang atau perusahaan untuk melakukan investasi adalah keuntungan yang diharapkan dimasa yang akan datang yang dibandingkan dengan biaya-biaya dan resiko dalam melakukan investasi. Pertimbangan-pertimbangan keuntungan dan biaya tersebut diantaranya dilihat dari jumlah yang dihasilkan oleh faktor produksi (tenaga kerja dan modal), biaya-biaya untuk memulai investasi, harga-harga dan kebijakan pemerintah yang mendukung kegiatan investasi.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh **Agung Nusantara** dan **Enny Puji Astutik** (2001) menjelaskan bahwa upaya penarikan investasi asing ke Indonesia perlu ditingkatkan. Oleh karena itu perlu dilakukan penyederhaan proses pengurusan izin-izin dan adanya keterpaduan koordinasi antar departemen melalui pemotongan jalur birokrasi, serta diterapkannya insentif perpajakan yang transparan dalam bentuk *tax holiday* yang masih baru untuk beberapa tahun. Disamping itu investasi asing mempunyai potensi untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi tidak hanya melalui transfer teknologi dan perbaikan pengetatan manajemen misalnya dengan pengembangan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, mendukung teknologi yang diterapkan, sehingga rencana alih teknologi dapat terlaksana dengan baik.

Hal serupa sejalan dengan ungkapan **Awan Wibowo Laksono Poesoro** (2005) dalam penelitiannya, dimana salah satu strategi untuk mengatasi masalah tersendatnya investasi di Indonesia adalah pemerintah perlu mempercepat proses penyederhanaan sistem pengurusan perizinan investasi sehingga biaya perizinan bisa ditekan.

Menurut **Bin Nahadi** dan **Djoko Retnadi** (2006), berbelit-belitnya rantai birokrasi bukan hanya berakibat pada lamanya waktu proses transaksi tapi lebih dari itu menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi. Selain disebabkan memang adanya biaya-biaya yang secara resmi ditetapkan, ditambah munculnya biaya yang timbul akibat hilangnya kesempatan-kesempatan ekonomi (*opportunity cost*), rusaknya mentalitas aparat menjadi menyebabkan birokrasi menjadi lahan subur untuk tumbuhnya segala bentuk pungutan liar.

Dengan keluaranya keppres No 29 tahun 2004 ternyata dapat memperbaiki kondisi pengurusan perizinan di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dipublikasikan oleh *Asian Development Bank* 2005. Sebagai dampak negatif desentralisasi, sekitar 21–25% perusahaan yang disurvei menganggap peraturan ketenagakerjaan dan ijin usaha telah memburuk. Terlebih lagi, sekitar 40% dari perusahaan yang disurvei beranggapan bahwa masalah ketidak-pastian hukum dan korupsi juga telah memburuk. Desentralisasi sebenarnya tidak harus menimbulkan dampak negatif terhadap iklim investasi karena kalau dikelola secara benar justru dapat meningkatkan arus investasi. Pemerintah daerah dapat mengambil keuntungan dari desentralisasi seperti yang dicontohkan oleh Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dengan keberhasilannya mendirikan Unit Pelayanan Terpadu.

Berdasarkan penelitian *Asian Development Bank* tersebut, maka proses perizinan yang tidak berbelit akan menciptakan dampak yang positif terhadap perkembangan FDI. Perizinan yang tidak berbelit-belit dapat diatasi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Keppres No 29 tahun 2004 mengenai penyelenggaraan penanaman modal (PMDN/PMA) melalui sistem pelayanan satu atap. Dalam Kepres tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanaman modal khususnya yang berkaitan dengan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM. Pelayanan satu atap ini meliputi penanaman modal yang dilakukan baik di tingkat propinsi, kabupaten dan kotamadya berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada BKPM. Sehingga setelah

dikeluarkannya Keppres ini dapat memutus birokrasi perizinan yang lama dan berbelit-belit dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang sama sebelumnya.

Tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi yang menentukan keuntungan perusahaan. Sehingga tenaga kerja menjadi faktor penentu para investor untuk melakukan investasi. Produktif atau tidaknya tenaga kerja dalam kegiatan akan menentukan keuntungan perusahaan, sehingga produktivitas tenaga kerja menjadikan acuan para investor untuk berinvestasi. Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja tidak sebanding dengan kenaikan upah minimum. Kenaikan upah minimum lebih tinggi dari produktivitasnya. Dengan kata lain kenaikan upah tidak berbanding lurus dengan produktivitasnya. Hal ini yang menyebabkan Investor menjadi berkeberatan untuk menanamkan investasinya di Indonesia (**Baskoro Agung Nugroho**, 2005).

Menurut **Sedarmayanti** (2007:100) peningkatan produktivitas sangat penting dalam lingkungan kompetitif global dewasa ini, dan sumber daya manusia memainkan peranan sangat penting dalam menurunkan biaya tenaga kerja. Betapapun hebatnya keberhasilan negara dalam perekonomian global, akan tergantung sepenuhnya dari kinerja organisasi, baik organisasi publik maupun swasta. Organisasi akan menjadi lebih baik melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien.

Menurut **Payaman J. Simanjuntak** (1998:38) produktivitas mengandung pengertian filosofis-kualitatif dan kuantitatif-teknis. Secara filosofis-kualitatif, produktivitas mengandung pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan. Sedangkan definisi produktivitas

tenaga kerja secara kuantitatif, produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai (keluaran) dengan keseluruhan sumberdaya (masukan) yang dipergunakan persatuan waktu.

Berdasarkan pengertian produktivitas diatas maka produktivitas secara umum dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah *output* dengan jumlah *input*. Dimana jumlah input dapat berupa barang atau jasa dan jumlah input dapat berupa orang, modal, bahan baku dan tenaga kerja. Dari konsep tersebut maka produktivitas secara umum dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Pr oduktivitas} = \frac{\text{keluaran}(\text{output})}{\text{Masukan}(\text{input})}$$

Menurut Sedarmayanti (1995:84) Produktivitas tenaga kerja menggunakan satu faktor, karena hanya membagi *output* dengan satu jenis input yaitu tenaga kerja. Perhitungan dapat berupa keluaran per orang, atau per jam, per hari, per minggu, per tahun, atau per jumlah jam kerja. Dapat pula mengikuti jumlah jam yang digunakan seluruh tenaga kerja, termasuk pemilik perusahaan dan keluarga pemilik yang bekerja tanpa gaji. Jadi, produktivitas tenaga kerja adalah suatu konsep yang menunjukkan perbandingan antara *output* (hasil kerja) dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk dari seorang tenaga kerja. Dari pengertian tersebut maka bila produktivitas tenaga kerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pr oduktivitas tenaga ker ja} = \frac{\text{output}(\text{barang / jasa})}{\text{jumlah tenaga ker ja} \times \text{waktu ker ja}}$$

Berdasarkan konsep produktivitas diatas, maka produktivitas tenaga kerja secara makro dapat dilihat dengan membandingkan antara *output* nasional dalam

hal ini adalah Produk Domestik Bruto/ *Gross Domestic Product* (GDP) dimana GDP menggambarkan total produksi suatu Negara yang merupakan hasil dari kegiatan produksi dan tenaga kerja yang merupakan faktor produksinya (Noor Yudanto dan M. Setyawan Santoso, 1998).

Berdasarkan pernyataan diatas **Kusnendi** (2002) menyatakan bahwa dalam menghitung PDB dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu produksi, pendapatan dan pengeluaran. PDB dengan pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai produk akhir yang dihasilkan suatu perekonomian selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Menurut **Suryana** (2000:83) di negara sedang berkembang umumnya memiliki persoalan sumber daya manusia yang sangat kompleks. Persoalan-persoalan itu meliputi:

1. kualitas sumber daya manusia
2. Penawaran tenaga kerja yang melebihi permintaan tenaga kerja
3. tingginya lulusan sekolah yang menganggur
4. Surplus Tenaga kerja tidak terdidik

Dalam bukunya **Kusnendi** (2002:12) **Kebijakan Fiskal** adalah semua tindakan pemerintah untuk mengendalikan jalannya kehidupan ekonomi nasional ke arah yang diinginkan yang diimplementasikan melalui APBN. APBN memiliki dua sisi:

1. sisi penerimaan bersumber terutama dari penerimaan pajak (Tx).

2. sisi pengeluaran terdiri dari berbagai pos pengeluaran yang apabila disederhanakan meliputi pengeluaran konsumsi pemerintah (G) dan pembayaran transfer (Tr).

Menurut **Budiono** (1999:50) yang dimaksud dengan pengeluaran pemerintah (G) adalah semua pembelian barang dan jasa yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah, yang dimasukkan ke dalam pengeluaran pemerintah hanyalah pembelian barang-barang dan jasa-jasa yang merupakan produksi tahun yang bersangkutan, sedangkan barang-barang atau jasa-jasa yang diproduksi tahun lampau tetapi dibeli pemerintah tahun ini bukanlah bagian dari pengeluaran pemerintah tahun ini.

Seperti yang dikemukakan oleh **Jhingan** dalam **Suryana** (2000;107) bahwa dalam konteks perekonomian negara terbelakang peranan kebijakan fiskal adalah untuk membentuk lajunya pembentukan modal. Kebijakan fiskal dirancang sebagai piranti pembangunan ekonomi. Menurutnya kebijakan ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan laju investasi
- b. meningkatkan kesempatan kerja
- c. untuk mendorong investasi optimal secara sosial
- d. untuk meningkatkan stabilitas ditengah ketidakstabilan ekonomi internasional

Menurut **Muana Nanga** (2002:214) Inflasi (*iflation*) adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Hal serupa dijelaskan juga oleh **Venieris** dan **Sebold** dalam **Muana Nanga** (2002:214) bahwa inflasi adalah sebagai suatu kecenderungan meningkatnya

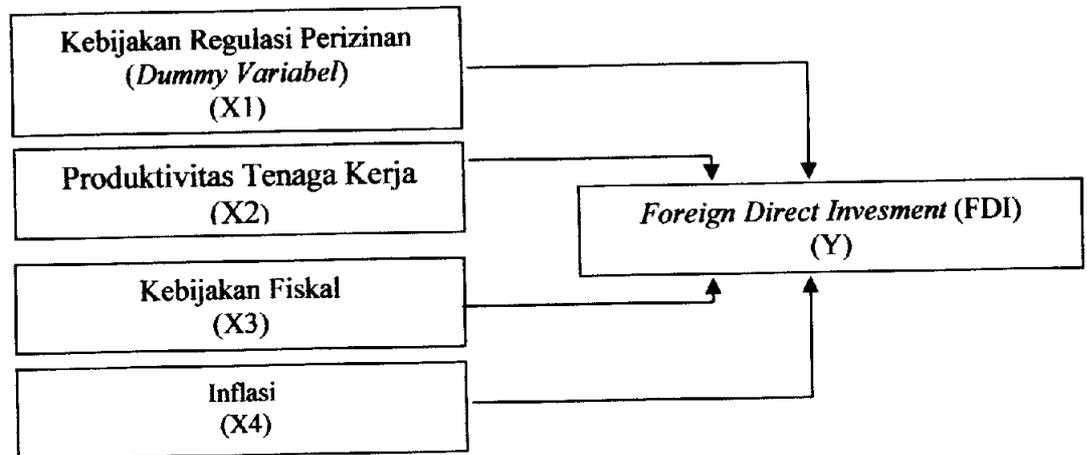
tingkat harga umum secara terus menerus sepanjang waktu (*a sustained tendency for the general level of prices to rise over time*). Sehingga, Inflasi dapat menurunkan tingkat efisiensi ekonomi (*economic efficiency*). Hal ini dapat terjadi karena inflasi dapat mengalihkan sumber daya dari investasi yang produktif (*productive investment*) ke investasi yang tidak produktif (*unproductive investment*) sehingga mengurangi kapasitas ekonomi produktif.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Suryana (2000:114) "apabila tingkat inflasi terlalu tinggi, dapat mengakibatkan modal/ dana yang diinvestasikan menjurus pada spekulatif dan produksi nasional tidak bertambah. Hal ini dikarenakan modal atau dana yang diinvestasikan kepada beraneka ragam pabrik memiliki tenggang waktu antara pembangunan pabrik sampai berproduksi atau dengan kata lain investasi telah dilakukan sedangkan produksi belum dihasilkan sehingga laba perusahaan menjadi berkurang".

Iklim investasi yang kurang baik di Indonesia menyebabkan para investor baru tidak mau melakukan investasi di Indonesia dan para investor yang sudah lama pun juga banyak yang memindahkan investasinya ke luar dari Indonesia, hal tersebut berdampak terhadap rendahnya FDI di Indonesia. Pemacu tidak baiknya iklim investasi di Indonesia diduga sebagai akibat dari stabilitas ekonomi Indonesia yang kurang baik sehingga tingginya biaya serta resiko yang harus ditanggung oleh para investor asing. Faktor dominan yang mempengaruhi FDI di Indonesia diantaranya adalah kebijakan pemerintah berupa perizinan dan kebijakan fiskal. Sedangkan faktor lainnya adalah produktivitas tenaga kerja yang rendah serta tingginya tingkat inflasi di Indonesia. Oleh sebab itu perizinan yang

tidak berbelit-belit, produktivitas tenaga kerja yang tinggi, kebijakan fiskal yang sesuai, serta pengendalian inflasi akan mendorong masuknya FDI ke Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka dibuat sebuah kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

1.5 Hipotesis

Dari kerangka pemikiran diatas maka ditarik hipotesis sebagai berikut:

1. Kebijakan Regulasi Perizinan berpengaruh secara positif terhadap *Foreign Direct Investment (FDI)*
2. Produktivitas tenaga kerja berpengaruh secara positif terhadap *Foreign Direct Investment (FDI)*
3. Kebijakan Fiskal berpengaruh secara positif terhadap *Foreign Direct Investment (FDI)*
4. Inflasi berpengaruh secara negatif terhadap *Foreign Direct Investment (FDI)*

